

Kerusuhan Santa Cruz Dili, Siapa Dalangnya ?

Hermínio da Silva da Costa

PENDAHULUAN

Masalah Timor Timur yang sejak tahun 1975 selalu dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB, sejak tahun 1982 dialihkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 37/30 Tahun 1982 dengan tugas untuk menjembatani perbedaan sikap tentang Timor Timur antara Indonesia dan Portugal kemudian melaporkan kepada Majelis Umum PBB.

Indonesia saat itu menyatakan dan mempertahankan sikap bahwa dekolonisasi Timor Timur telah selesai dengan Proklamasi Wakil Rakyat Timor Timur yang dideklarasikan pada tanggal 31 Mei 1976 di Dili. Dan Portugal mengatakan serta mempertahankan sikap bahwa dekolonisasi belum dilaksanakan dan dekolonisasi harus dilaksanakan dengan pelaksanaan "hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan" sebagaimana tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 Tahun 1960 dan kewajiban Portugal yang tertuang dalam Konstitusi Portugal Pasal 297 Tahun 1982, menyatakan "Portugal tetap berpegang pada tanggungjawab dan kewajiban dalam hukum internasional dan menjamin hak kemerdekaan Timor Timur".

Sebagai tindak lanjut Resolusi Majelis Umum PBB 37/30 dan hasil mendiasi Sekjen PBB disepakati bahwa Indonesia mengundang Parlemen Portugal untuk berkunjung ke Timor Timur dan hasilnya dilaporkan kepada PBB dan pemerintah Portugal. Untuk pelaksanaan kesepakatan itu, Indonesia menetapkan bahwa kunjungan anggota Parlemen Portugal dapat dilaksanakan pada akhir Oktober dan awal November tahun 1991. Untuk menjamin kesuksesan kunjungan Parlemen Portugal tersebut, pemerintah Indonesia mempersiapkan semua fasilitas dan kemudahan logistik berupa penginapan, transport ke seluruh pelosok Timor Timur, kemudahan akses untuk menemui semua pimpinan gerilyawan komunis Fretilin dan Falentil termasuk pimpinannya Jose Alexandre Gusmao, kemudahan akses untuk menemui secara bebas dengan semua masyarakat dan akses ke semua rumah tahanan pemerintah.

Pemerintah Indonesia dan tokoh-tokoh politik serta rakyat Timor Timur yang mendukung integrasi atau kemerdekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menyambut gembira kunjungan tersebut dengan harapan bahwa, kunjungan itu akan sukses dan mendapat penilaian positif dari ang-

gota parlemen Portugal sehingga mendapat dukungan dan pengakuan pemerintah Portugal, PBB dan masyarakat internasional bahwa Timor Timur merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan aspirasi masyarakat Timor Timur yang dideklarasikan oleh Parlemen Rakyat Timor Timur pada tanggal 31 Mei 1976 di Dili.

REAKSI GERILYAWAN KOMUNIS FREILIN DAN FALENTIL.

Pihak gerilyawan komunis Fretilin dan Falentil pimpinan Jose Alexandre Gusmao menyambut kunjungan anggota Parlemen Portugal itu dengan asumsi bahwa, apabila kunjungan tersebut sukses dan mendapat penilaian positif atas Timor Timur dalam Republik Indonesia maka akan menyebabkan pencabutan Pasal 297 Konstitusi Portugal tentang "Penentuan Nasib Sendiri dan Kemerdekaan Timor Timur" kemudian akan disusul dengan pengakuan PBB atas Timor Timur sebagai bagian integral dari Indonesia, maka kesempatan dan peluang untuk mendirikan satu negara akan tertutup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, gerilyawan komunis pimpinan Jose

Alexandre Gusmao, Jose Ramos Horta dan Mari Alkatiri yang didukung partai komunis Frelimo dari Mosambik, Partai Komunis Portugis, Partai Sosialis Portugis dan Partai Sosial Demokrat Portugis, bertekad untuk menggagalkan kunjungan anggota Parlemen Portugal ke Timor Timur, dan untuk itu komando gerilyawan komunis mengeluarkan perintah kepada pasukan komunis bersenjata dan pemuda komunis klandestin di kota Dili dan di Kabupaten-kabupaten, sebagai berikut :

1. Meningkatkan propaganda anti Indonesia dan melakukan demo-demo yang dapat memancing reaksi dari polisi dan militer Indonesia sehingga dapat diliput oleh wartawan asing di ibu kota Dili dan Kabupaten.
2. Pemuda klandestin di kota Dili dan Kabupaten menduduki Gereja-gereja termasuk kediaman Uskup dan Pastor-pastor dan menjadikannya tempat pengungsian dan basis gerilyawan bersenjata. Agar disaat kunjungan Parlemen Portugal melakukan operasi perebutan kota Dili dan menyandera semua anggota Parlemen dalam Gereja.
3. Pemuda klandestin di kota Dili dan kabupaten dengan cara-cara apapun termasuk mencuri dan mem-

perkosa, berusaha agar ditahan dan dimasukkan ke rumah Tahanan Bekora agar dapat memberi kesan bahwa keadaan Timor Timur seperti neraka dan akan diliput secara luas oleh wartawan asing.

4. Pemuda klandestin di Jawa dan Bali yang sedang mengikuti pendidikan di Universitas-universitas melakukan aksi demo dan meminta suaka politik di Kedutaan-kedutaan Besar Negara asing di Jakarta sehingga dapat membangun opini internasional tentang keadaan sebenarnya yang dialami para pemuda Timor Leste di Indonesia.
5. Kader-kader Fretilin, para bekas komandan dan anggota Falentil yang berada dalam jajaran pemerintah daerah, militer dan polisi Indonesia dan pengusaha diwajibkan bekerja sama di semua tingkatan operasi pemboikotan dan menggagalkan kunjungan anggota Parlemen Portugal ke Timor Timur.

PENDUDUKAN ATAS GEREJA MOTAEL.

Atas dasar perintah komando gerilyawan komunis yang disampaikan secara rahasia dari kader ke kader lainnya, maka sedikitnya 30 pemuda ko-

munis klandestin dan gerilyawan komunis Falentil telah menyusup ke kota Dili pada minggu ke 2 bulan Oktober 1991 dan menduduki Gereja Motael dengan alasan, berlindung untuk menghindari dari pengejaran dan penangkapan oleh polisi dan militer Indonesia. Para pemuda komunis klandestin itu antara lain Jorge Serrano, Aleixo "cobra", Bobby Xavier, Juvencio, Sebastiao Rangel dan lain-lain.

Menjelang Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, keadaan kota Dili sempat tegang, wartawan asing ada dimana-mana termasuk wartawan Portugis yang masuk dengan menggunakan paspor dari negara lain. Mereka bebas meliput berita dan mengatur para pemuda untuk bergerak dan menciptakan kekacauan di kota Dili dan di kabupaten.

Melihat keadaan yang makin tegang, Panglima Komando Operasi Keamanan Timor Timur Brigadir Jenderal TNI Warrou membentuk "*Operasi Domin*" dengan tujuan terciptanya rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan antara sesama warga tanpa memandang perbedaan politik yang ada untuk menunjang kebebasan, ketertiban dan kedamaian, sehingga dapat mencairkan ketegangan menjelang kun-

jungan anggota Parlemen Portugal. Kemudian pada tanggal 26-27 Oktober, Panglima Brigjen TNI Warrou melakukan pertemuan dengan Uskup Belo, kemudian bersama-sama menyepakati bahwa, 1. Gereja Motael dan Gereja di Timor Timur harus bebas dari kegiatan politik, 2. pemuda-pemuda yang telah menduduki Gereja Motael tidak akan ditahan, 3. Para pemuda akan dijemput oleh Panglima dan Uskup Belo dengan bus Korem dan tinggal di kediaman Panglima apabila mereka takut kembali ke rumah masing-masing, dan 4. Selama berada di kediaman Panglima kepada mereka dijamin kebebasan untuk menerima dan menemui anggota Parlemen Portugal dan wartawan asing.

Pada tanggal 27 Oktober malam, Bupati Dili Armindo Soares Mariano mengundang rapat di kediamannya di Vila Verde dan dalam rapat itu hadir seorang utusan Panglima, Anggota Muspida, tokoh-tokoh masyarakat kabupaten Dili. Dalam rapat itu utusan Panglima, menyampaikan pesan bahwa, Panglima tidak setuju untuk menyerang Gereja Motael dan menangkap para pemuda yang menduduki Gereja, Panglima bersama Uskup Belo menyepakati untuk bersama-sama memberi perlindungan, keamanan dan

kebebasan kepada pemuda-pemuda yang telah menduduki Gereja Motael. Berhubung ada informasi bahwa gerilyawan komunis Falentil akan menyusup dan menduduki Gereja-gereja termasuk kediaman Uskup dan para pastor, maka pada malam tanggal 27 Oktober, polisi dan militer melakukan penjagaan khusus.

Menjelang fajar tanggal 28 Oktober para pemuda dan gerilyawan komunis yang telah menduduki Gereja Motael secara mendadak menyerang pasukan aparat keamanan yang sedang menjaga di sekitar gereja untuk merebut senjata. Dalam upaya perebutan senjata tersebut, seorang pemuda klandestin bernama Sebastiao Rangel tewas tertembak setelah menolak perintah untuk mundur dan tidak menghiraukan tembakan peringatan ke udara oleh pasukan, melainkan pemuda tersebut terus maju dan menyerang seorang perwira berpangkat kapten, berusaha merebut senjatanya. Para pemuda lainnya setelah mendengar perintah mundur dan disusul dengan tembakan peringatan ke udara, mereka mundur dan kabur meninggalkan Gereja Motael. Berita kematian pemuda klandestin Sebastiao Rangel di sekitar 40 meter dari Gereja Motael menyebabkan Portugal membatalkan kunjungan anggota

Parlemennya ke Timor Timur. Hal ini mendapat perhatian dan keprihatinan dari PBB dan masyarakat internasional sehingga muncul kritik dan tekanan internasional yang dilanjutkan dengan sanksi dan embargo militer terhadap Indonesia oleh Amerika Serikat dan Eropa.

PEMAKAMAN SEBASTIAO RANGEL.

Sesudah peristiwa di Gereja Motael tanggal 28 Oktober 1991 yang menewaskan Sebastiao Rangel, pihak pemerintah dan militer mengizinkan untuk dimakamkan secara layak oleh keluarga dan handai taulan. Setelah dua hari penyerangan tersebut, pemuda yang tewas itu dimakamkan dengan upacara misa yang dipimpin oleh Uskup Belo kemudian disusul dengan prosesi dari Gereja Motael hingga pemakaman umum Santa Cruz Dili. Dalam misa dan prosesi mengantar jenazah Sebastiao Rangel dihadiri sekitar 1.000 hingga 1.500 orang dan berjalan dengan tenang dan tertib. Walau pun pihak aparat keamanan militer dan polisi Indonesia mengetahui adanya penyusupan besar-besaran dari pihak gerilyawan komunis dan telah menunggangi Gereja Katolik dan

pimpinan umat Khatolik, pengawasan dan keamanan sepanjang rute prosesi hingga pemakaman umum Santa Cruz Dili tetap dijamin keamanannya oleh Panglima Warrow sehingga tidak terjadi insiden apa pun selama prosesi dan sesudah pemakaman Sebastiao Rangel.

KERUSUHAN DAN INSIDEN 12 NOPEMBER.

Sesuai kebiasaan rakyat secara turun temurun di Timor Timur dan diakui oleh Gereja Khatolik, bahwa setelah tujuh hari pemakaman akan dilakukan taburan bunga didahului dengan misa Requiem di Gereja. Untuk acara ini ditetapkan oleh keluarga pada tanggal 7 Nopember. Pemberitahuan secara lisan oleh keluarga dilakukan, termasuk melalui fasilitas RRI Dili agar semua keluarga dan handai-taulan bisa menghadiri misa Requiem disusul penaburan bunga di pemakaman umum Santa Cruz Dili. Akan tetapi acara ini dibatalkan secara mendadak pada tanggal 5 Nopember setelah Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB tuan Koejimans (asal negeri Belanda) menelpon Pastor Paroki Motael Alberto Ricardo da Silva untuk menunda acara misa Requiem dan taburan bu-

nga tanggal 7 menjadi tanggal 12 Nopember 1991, karena tuan Koejimans akan berkunjung ke Dili Timor Timur pada tanggal 11 Nopember dan hari berikutnya tanggal 12 Nopember akan ikut prosesi dan taburan bunga di pemakaman umum Santa Cruz Dili sebagai tanda penghargaan dan rasa solidaritas kepada perjuangan pemuda klandestin Fretilin Sebastiao Rangel.

Penundaan yang dipaksakan oleh tuan Koejimans selaku Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah mendorong semangat juang perlawanan gerilyawan komunis Fretilin dan para pemuda klandestinnnya untuk merencanakan sesuatu yang lebih berarti untuk mendapat perhatian internasional. Maka segala persiapan yang sebelumnya untuk menyambut anggota Parlemen Portugal dialihkan untuk penyambutan kedatangan Ketua Komisi Hak Asasi PBB tuan Koejimans.

Tanggal 12 Nopember 1991 jam 6.00 pagi Gereja Motael telah dipenuhi oleh ratusan orang dengan spanduk yang disembunyikan dalam baju atau ransel masing-masing dan semua mengikuti misa Requiem dengan tenang dan tertib yang dipimpin oleh Pastor Paroki Alberto Ricardo da Silva. Setelah misa selesai, massa yang tadinya ber-

perilaku tenang dan tertib mendadak menjadi bringas dan agresif, meneriakan ancaman, pekik kemerdekaan dan maju secara brutal menuju kearah kantor gubernur. Di depan kantor gubernur mereka bukannya belok ke kanan kearah pemakaman umum Santa Cruz Dili, tapi justru maju terus menuju Hotel Turismo di mana Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Koejimans menginap. Namun mereka dihadang oleh aparat keamanan militer dan polisi. Pada saat yang sama massa berdatangan dari Bidau, Kuluhun, Bekora dan Vila Verde dan ingin bergabung dengan masa dari Gereja Motael, tapi mereka dilarang bergabung karena membawa pisau, kayu, batu dan benda-benda lainnya untuk menyerang aparat keamanan yang sedang berusaha menertibkan prosesi. Dalam serangan terhadap pihak keamanan militer di depan Kodim Dili hingga depan Hotel Resende, seorang perwira bernama Gerhan disandra dan ditikam serta dipukul oleh masa yang muncul dari semua arah. Melihat keadaan yang semakin kacau perwira itu memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur dan menjaga jarak dengan penyerang agar tidak terjadi bentrokan.

Massa yang satu jam sebelumnya di

Gereja Motael berperilaku bagaikan anak-anak Tuhan, berubah menjadi "*anak-anak setan*" dan Jl. Bispo Medeiros kearah pemakaman umum Santa Cruz Balide juga berubah menjadi "Jl. NERAKA yang dipenuhi setan-setan". Pemuda komunis klandestin memekik perang terhadap Indonesia, mengancam membakar rumah-rumah dan membunuh semua orang yang pro Indonesia.

Setibanya di pemakaman Santa Cruz Balide dari dalam berhamburan serentetan tembakan menyambut massa yang masuk dan massa yang ada dalam pemakaman yang akibatnya sejumlah orang terkena peluru dan tewas seketika. Massa yang terkejut mundur melalui pintu utama ke jalan raya dan pada saat itulah aparat keamanan tiba sebanyak 4 truk militer dan melakukan tembakan ke udara untuk melindungi massa.

Dari data resmi yang dihimpun sesudah kejadian penembakan di atas jumlah orang yang tewas tertembak adalah 19 orang termasuk seorang pemuda petinju yang sedang meletakan bunga di pemakaman keluarga walaupun tidak termasuk rombongan massa yang datang dari Gereja Motael.

DEMO PEMUDA KOMUNIS KLANDESTIN DI JAKARTA.

Setelah mengetahui kejadian Santa Cruz Dili pada tanggal 12 Nopember 1991, pemuda-pemuda komunis klandestin yang sedang mengikuti pendidikan di Jawa dan Bali, berkumpul di Jakarta dan melakukan demo mendukung partai komunis Fretilin pada tanggal 18 Nopember 1991 serta memprotes kejadian tersebut sebagai tindakan *genocide* untuk menyelesaikan masalah Timor Timur.

SIAPA PELAKU PENEMBAKAN ?

Kerusuhan dan penembakan tersebut secara internasional disoroti oleh negara-negara yang tidak simpatik dengan Indonesia dan menuduh Indonesia sebagai pelaku penembakan serta didukung oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, walaupun sebelumnya, telah ada indikasi kuat dan jelas bahwa pelaku penembakan bukan berasal dari aparat keamanan, namun kebenaran kejadian dengan cepat disingkirkan dan muncul kebohongan sesuai pesan sponsor yang merugikan Indonesia di mata internasional.

Pihak gerilyawan komunis Fretilin dan

Falentil dalam siaran persnya di luar negeri oleh Jose Ramos Horta mengatakan bahwa pasukan Indonesia melakukan penembakan secara membabi buta di pemakaman umum Santa Cruz Dili, menewaskan ratusan orang dan meminta perhatian internasional. Versi ini didukung oleh para pemimpin Gereja Khatolik di Timor Timur, Komnas HAM Indonesia, Komisi Hak Asasi Manusia PBB serta masyarakat internasional.

Namun penjelasan dari para saksi mata dan korban penembakan, tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan gerilyawan komunis Falentin serta pemuda komunis klandestin yang disampaikan secara bebas kepada penulis melalui pendekatan kekeluargaan adalah sebagai berikut :

1. Penundaan misa Requiem dari tanggal 7 Nopember menjadi tanggal 12 Nopember 1991 adalah atas permintaan tuan Koejimans selaku Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB kepada Pastor Paroki Motael Alberto Ricardo da Silva melalui telepon dari kantornya di Jenewa sehingga dianggap telah memberi dukungan dan persetujuan untuk Fretilin melakukan segala sesuatu demi mempertahankan eksistensi perjuangannya.

2. Komandan gerilyawan komunis Fretilin dan Falentil Jose Alexandre Gusmao dan pimpinan politik partai di luar negeri Jose Ramos Horta dan Mari Alkatiri yang memerintahkan rencana A (untuk menyambut kedatangan anggota Parlemen Portugal) dialihkan ke saat tuan Koejimans dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB berkunjung ke Dili.
3. Saat terjadi penembakan dari dalam pemakaman umum Santa Cruz Dili aparat keamanan Indonesia belum tiba di pintu depan pemakaman. Setelah 5 menit kemudian baru tiba 4 truk dengan muatan tentara. Selanjutnya pasukan Indonesia melakukan tembakan ke udara untuk melindungi massa yang lari keluar dari tempat pemakaman. Massa yang lari keluar sudah terluka bahkan ada yang tewas tertembak dan ditarik keluar oleh temannya sendiri untuk berlindung dan dilindungi oleh pasukan keamanan Indonesia yang baru tiba setelah tembakan tadi terjadi. Saat penembakan ke udara oleh aparat keamanan tersebut, Pastor Joao Filgeiras dari Serikat Jesuit berada diantara massa yang lari keluar dan aparat keamanan Indonesia. Seandainya ada maksud untuk membunuh massa yang lari keluar tersebut, tentu Pastor Joao Filgeiras SJ pasti tertembak dan tewas, tetapi ternyata tidak.
4. Sumber lain dari pemuda klandestin di Dili yang didukung dan dibenarkan oleh Jose da Costa (Mau Hudo) menyatakan bahwa komandan gerilyawan Jose Alexandre Gusmao pada tanggal 11 Nopember telah berada di Dili dan dia memerintahkan penyusupan pasukan gerilya pada malam 11 Nopember ke dalam pemakaman umum Santa Cruz Dili untuk persiapan operasi pada tanggal 12 Nopember 1991 saat massa masuk ke dalam pemakaman umum Santa Cruz Dili bersama tuan Koejimans dan Uskup Belo dimana rencananya akan ikut dalam prosesi dan penaburan bunga ke makam Sebastiao Range. Operasi ini dipimpin langsung oleh Gusmao.

TINDAKAN PEMERINTAH PUSAT

Pemerintah Pusat di Jakarta dalam menanggapi peristiwa Santa Cruz Dili, semula terkesan membenarkan tindakan yang dilakukan aparat keamanan Indonesia dan juga mengakui bahwa pelaku penembakan di pemakaman

umum Santa Cruz Dili dilakukan oleh gerilyawan komunis Fretilin dan Falentil pimpinan Jose Alexandre Gusmao sehingga Presiden mengambil kebijaksanaan memutuskan kerjasama ekonomi dengan Belanda. Akan tetapi dengan berbagai tekanan internasional yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Eropa akhirnya Indonesia dikenakan embargo militer.

KESIMPULAN

Dari seluruh kejadian di Timor Timur khususnya di Kota Dili hingga muncul apa yang dikenal sebagai "Peristiwa Santa Cruz Dili" pada tahun 1991 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Rencana kunjungan anggota Parlemen Portugal ke Timor Timur bagi partai komunis Fretilin dan gerilyawan komunis bersenjata Falentil pimpinan Jose Alexandre Gusmao yang didukung oleh Partai Komunis Portugal, Partai Sosialis Portugal, Partai Sosial Demokrat Portugal dan partai komunis Frelimo dari Mosambik Afrika, disambut dengan rasa curiga dan penuh ketakutan sebab, apabila anggota Parlemen Portugal memberi penilaian positif dalam laporannya, maka akan

mempengaruhi dan mendorong dukungan internasional untuk mencabut masalah Timor Timur dari agenda PBB serta sekaligus pengakuan Timor Timur sebagai bagian integral dari Indonesia. Oleh karena itu mereka berkepentingan untuk memboikot dan menggagalkan kunjungan anggota Parlemen Portugal tersebut.

Koejimans selaku Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang meminta agar misa Requiem untuk arwah Sebastiao Rangel ditunda dari tanggal 7 November 1991 dan ikut mengkondisikan terjadinya peristiwa Santa Cruz Dili, ternyata luput dari tanggungjawab sebagai otak kerusuhan tersebut. Bahkan sebagai pahlawan hak asasi manusia dia ikut mengatur sangsi-sangsi dan embargo militer terhadap Indonesia.

Partai komunis Fretilin dengan kekuatan gerilyawan yang tergabung dalam Falentil kurang lebih 250 orang bersenjata dan arsitek politik di luar negeri seperti Jose Ramos Horta dan Mari Alkatiri ternyata berhasil mengkondisikan embargo senjata terhadap Indonesia melalui operasi kerusuhan di Gereja Motael pada tanggal 28 Oktober 1991 dan peristiwa berdarah Santa Cruz Dili pada tanggal 12 November

1991.

Dengan demikian menjawab pertanyaan judul tulisan ini dapatlah pembaca menyimaknya sendiri.

CATATAN REDAKSI :

Penulis adalah salah satu korban peristiwa Santa Cruz Dili, dimana selama 5 hari berturut-turut harus berhadapan dengan tim penyidik yang menerima laporan dari orang-orang misterius bahwa penulis ikut terlibat dan hadir di pemakaman Santa Cruz. Atas dasar itu, penulis memutuskan untuk

melakukan penyelidikan secara independen dan cermat untuk mencari pelaku sebenarnya dari peristiwa Santa Cruz Dili.

Dalam tulisan ini, penulis yakin menyebut "partai komunis Fretilin, gerilyawan komunis Fretilin dan Falentil atau pemuda komunis klandestin". Hal ini berdasarkan pidato Jose Alexandre Gusmao pada hari perayaan proklamasi kemerdekaan Fretilin, tanggal 28 Nopember tahun 1987 yang kemudian disebarluaskan pedoman perjuangan melawan kehadiran Indonesia di Timor Timur. □

